



Implementasi Aplikasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam Mendukung Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tulungagung

Sotya Prima Ratitya *

Ni Putu Anik Prabawati

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Correspondence: *sotyapr@gmail.com

Abstract

The objective of this study is to determine how the implementation of the Tulungagung Livable Program (PROTAL) application supports the management of slum areas in Tulungagung Regency. This descriptive qualitative study aims to determine how the implementation of the PROTAL application supports the management of slum areas in Tulungagung Regency. Data in this study were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of PROTAL has been a positive innovation in public service, particularly in efforts to integrate data related to slum areas from communities and villages, based on seven slum indicators. However, in the implementation of PROTAL, several challenges were identified and analyzed using Edward III's policy implementation theory, namely communication aspects, resources, disposition, and bureaucratic structure. The challenges faced include inadequate coordination among relevant parties, limited human resource capacity, overly complex bureaucracy, and a lack of commitment from policy actors. Although PROTAL has generally become an innovation supporting efforts to address slum areas in Tulungagung District, its success depends on improving communication aspects, strengthening all dimensions of resources, enhancing the commitment of policy actors, and simplifying bureaucratic structures. These improvement efforts are expected to support the implementation of PROTAL to run more optimally and sustainably.

Keywords: Implementation, Policy, PROTAL, Public Services

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam mendukung penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi PROTAL dalam mendukung penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PROTAL telah menjadi inovasi positif dalam pelayanan publik, terlebih khusus dalam upaya mengintegrasikan data terkait wilayah kumuh dari masyarakat dan desa, berdasarkan tujuh indikator kumuh. Namun, dalam pelaksanaan PROTAL masih ditemui beberapa kendala yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yaitu aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Kendala yang dihadapi mencakup kurang optimalnya koordinasi antar pihak terkait, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, birokrasi yang terlalu kompleks, serta kurangnya komitmen dari aktor kebijakan. Meskipun secara umum PROTAL telah menjadi inovasi yang mendukung upaya penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung, keberhasilannya bergantung pada pembenahan aspek komunikasi, penguatan seluruh dimensi sumber daya, peningkatan komitmen aktor kebijakan, serta penyederhanaan struktur birokrasi. Upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi PROTAL berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, PROTAL, Pelayanan Publik

I. Pendahuluan

Kemampuan dari aplikasi teknologi informasi komunikasi berkembang sangat pesat pada abad ke-20. Perkembangan ini dilihat sebagai sebuah perkembangan yang dramatis dalam kehidupan karena telah mampu membuat suatu revolusi melalui kemudahan dalam segala hal untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Selama beberapa tahun terakhir, internet dan perkembangan teknologi lainnya telah memberikan

perubahan terhadap cara mengelola informasi dan penyampaian maksud serta respon dari pengelolaan informasi tersebut, menentukan kemampuan verbal dan ruang untuk mengeluarkan pendapat, serta dalam menentukan keputusan yang diambil dan berperilaku berdasar pada informasi yang diperoleh.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya menyalurkan perubahan bagi pola pemikiran masyarakat, tetapi juga pada penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Bukti dari pengaruh perkembangan teknologi terhadap pelayanan publik dan pemerintahan nampak dari bagaimana suatu keputusan diambil, dimana saat ini mulai diberlakukan dengan bantuan teknologi informasi maupun data sajian yang berbasis web guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan atau disebut *E-Government* menjadi bentuk upaya pemerintah dalam melakukan inovasi di sektor pelayanan publik, yang dapat digunakan untuk menaikkan nilai kualitas pelayanan, khususnya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Inovasi berbasis elektronik dalam tata kelola pemerintahan merupakan sebuah perkembangan yang dapat mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik, baik antara pemerintah dengan pemerintah, dan khususnya antara pemerintah dengan masyarakat (penerima layanan). Menurut Indrajit (dalam Resky Amalia, 2023:3), *E-Government* merupakan bentuk pemanfaatan dari suatu teknologi informasi oleh pemerintah guna menjalankan transformasi hubungan dengan internal pemerintahan, *stakeholder* (pihak swasta), masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang memiliki keterlibatan kepentingan dalam pelaksanaan pemerintahan. *E-Government* menjadi jawaban dari berbagai upaya yang diberlakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan tidak menimbulkan penyimpangan atau kasus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

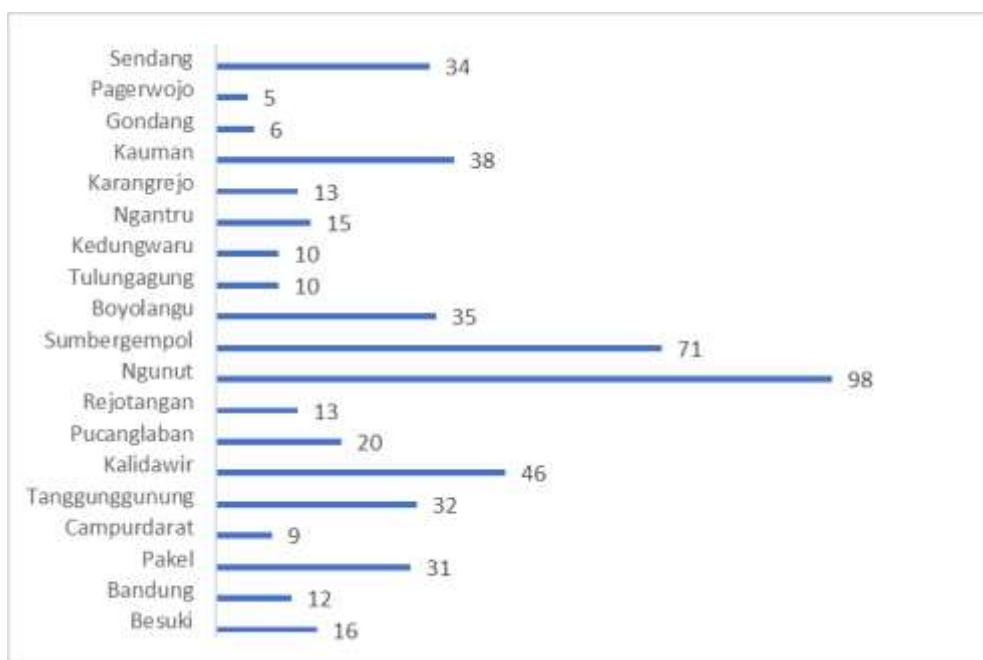
Penggunaan teknologi dan informasi menjadi suatu hal yang sangat membantu efisiensi dan efektivitas suatu pelayanan publik. Teknologi berperan dalam meningkatkan akurasi, kecepatan, dan kemudahan dalam pelayanan publik. Pemerintah di era globalisasi saat ini berinovasi untuk membuat program yang dapat lebih mempermudah namun juga melibatkan masyarakat. Sebagai aktor pembuat kebijakan, pemerintah terus berupaya melahirkan produk kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan menyelesaikan permasalahan publik. Kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil apabila diimplementasikan dengan baik. Di sisi lain, keberhasilan implementasi itu sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Ketepatan sasaran dari suatu kebijakan menjadi hasil akhir dari pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan tersebut, karena apabila kebijakan yang dibuat sudah tepat sasaran, maka kebutuhan pelayanan publik dapat terpenuhi (Agustino, 2016).

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Tulungagung merupakan satu dari sekian banyaknya perangkat daerah yang berusaha menyempurnakan pelayanan publik dengan *E-Government* melalui inovasi aplikasi. Fokus pelayanan publik dari Disperkim Kabupaten Tulungagung adalah meningkatkan dan menjaga infrastruktur Kabupaten Tulungagung agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan publik terhadap barang, jasa dan/atau pelayanan administratif. Salah satu upaya dari perwujudan fokus tersebut adalah penanganan wilayah kumuh.

Hingga saat ini permasalahan yang dihadapi adalah bahwa masih terdapat isu belum efektif dan efisiennya proses penanganan kumuh, khususnya setelah Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) berakhir. Kurangnya regulasi yang mengatur tentang tata kelola penanganan kawasan kumuh dinilai menjadi penyebab dari timbulnya isu tersebut. Dalam penyebab utama tersebut, masih terdapat juga beberapa permasalahan lain yang menjadi isu penanganan kumuh seperti sistem perencanaan penanganan kawasan kumuh yang masih situasional dan belum menyeluruh/merata, masih rendahnya penanganan kawasan kumuh karena target penanganan yang terbatas, masih terbatasnya *database* perencanaan penanganan kawasan kumuh, serta program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang ternyata belum mampu mengakomodasi semua penanganan kumuh.

Disperkim Kabupaten Tulungagung sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung. Satu dari beberapa upaya yang dilakukan yaitu melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni di tiap kecamatan, dimana terhitung tidak sedikit jumlah rumah yang direhabilitasi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 514 rumah.

Gambar 1. Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan di kabupaten Tulungagung Tahun 2022 (Unit)



(Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2023)

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) cukup membantu penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung, namun permasalahan-permasalahan penanganan wilayah kumuh di atas masih belum terselesaikan melalui program RTLH ini, sehingga diperlukan suatu inovasi yang mampu menyelesaikan permasalahan regulasi, *database*, pembiayaan, dan permasalahan lain di atas.

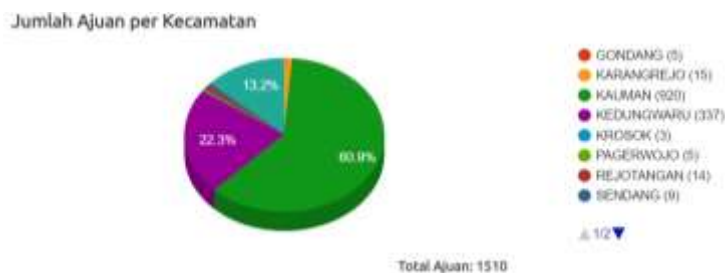
Melihat permasalahan di atas dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, maka yang menjadi fokus proyek perubahan adalah penataan tata laksana, dimana dengan regulasi dan aplikasi digital sebagai sarana penghimpunan *database* perencanaan, proses penanganan kumuh akan memiliki arah dengan payung hukum yang akan menjamin keberlanjutan proses penanganan wilayah kumuh. Hal tersebut menjadi dasar perwujudan Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung. Berdasar pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 188.4/81/20.01.03/2022 tentang Tim Efektif Eksternal Tata Kelola Penanganan Kawasan Kumuh Melalui Program Tulungagung Layak Huni, aplikasi PROTAL diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dalam penanganan kumuh secara menyeluruh, pelibatan masyarakat dan *stakeholder* secara aktif, sehingga dapat meningkatkan adanya transparansi dan peluang pembiayaan dari sumber lainnya, dimana hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, tersedianya satu *database* perencanaan yang akurat dan transparan akan meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan kawasan kumuh, sehingga indikator kumuh akan dapat ditangani secara merata.

PROTAL menjadi inovasi yang nampaknya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam upaya penanganan wilayah kumuh di Kabupaten Tulungagung. Namun, dalam pelaksanaannya, PROTAL masih menghadapi beberapa kendala baik dari segi eksternal (kendala operator desa) maupun internal (aplikasi dan kelompok kerja pengusung). Dengan keterlibatan banyak pihak, tentu pencapaian keberhasilan inovasi aplikasi ini tidak hanya bergantung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Tulungagung sebagai pihak pemerintah yang bertanggungjawab. Di samping itu, harapan agar pelibatan secara aktif dari *stakeholder* dan masyarakat sedikit kurang optimal khususnya dalam adaptasi terhadap penggunaan aplikasi.

Permasalahan pertama dalam implementasi PROTAL adalah Sumber Daya Manusia (SDM) operator desa sebagai pihak yang mengajukan penanganan 7 indikator kumuh. Beberapa permasalahan

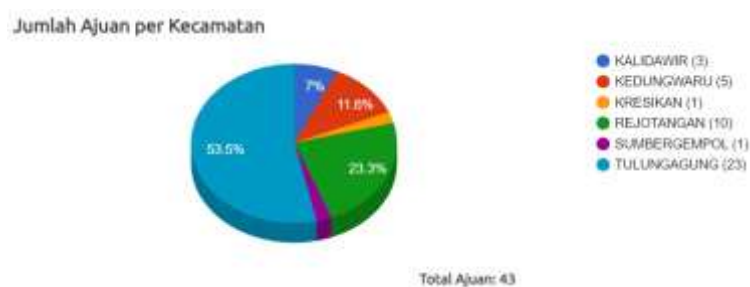
implementasi yang berkaitan dengan operator yaitu masih cukup banyak operator yang belum memahami secara utuh terkait sistem dan data dalam penginputan, pihak yang menjadi operator PROTAL memiliki tanggungjawab lain sehingga belum dapat melakukan input data pengajuan, tidak adanya intensif bagi operator pengajuan PROTAL, serta adanya pergantian personil operator kepada pihak yang tidak mengikuti bimbingan teknis dari Tim Efektif Kelompok Kerja sehingga kurang memahami sistem PROTAL. Selain dari pihak operator, terdapat beberapa permasalahan lain dalam implementasi PROTAL. **Permasalahan kedua** berhubungan dengan transparansi ajuan, dimana pihak kelurahan atau desa khawatir terkait tindaklanjut penginputan atau pengajuan nantinya hanya menjadi wacana atau terealisasi.

Gambar 2. Draft Ajuan per Kecamatan Tahun 2023 - 2024



(Sumber: PROTAL Disperkim Tulungagung, 2024)

Gambar 3. Pengajuan per Kecamatan yang Ditetapkan



(Sumber: PROTAL Disperkim Tulungagung, 2024)

Perbedaan yang cukup drastis terlihat dalam jumlah draft ajuan serta pengajuan ditetapkan dari masing-masing kecamatan. Dari 264 total pengajuan, hanya 43 jumlah pengajuan yang ditetapkan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor dari cukup kecilnya harapan dari pihak yang melakukan pengajuan terhadap realisasi ajuan. Selain itu, identifikasi ke lapangan yang dilaksanakan juga menjadi kekhawatiran bagi pihak kelurahan karena dapat menimbulkan anggapan dari masyarakat yang diidentifikasi seolah akan menerima bantuan dalam waktu dekat. Implementasi PROTAL juga sedikit menemui permasalahan pada adanya kekhawatiran beberapa pihak terkait data pengajuan akan tumpang tindih dengan ajuan di kegiatan lain karena adanya beberapa program lain terkait penyelesaian indikator kumuh. Keberhasilan dan pencapaian tujuan kebermanfaatan dari kebijakan inovasi PROTAL perlu dilihat dari upaya penyelesaian dari permasalahan yang ditemui dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga nantinya dapat optimal dalam menangani atau mengurangi kawasan kumuh di wilayah Tulungagung, serta bagaimana pencapaian sasaran atau tujuan kebijakan yang menjadi garis akhir pembuatan kebijakan (Ayuningtyas, 2014).

Permasalahan internal dari aplikasi PROTAL berkaitan dengan aplikasi dan pihak kelompok kerja sebagai pengusung program. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan, ditemukan **permasalahan ketiga**, dimana dinilai bahwa perlu adanya pembaharuan terkait tampilan pada pengguna (*user interface*). Pengembangan tampilan aplikasi akan mempermudah operator dalam melakukan pengajuan melalui aplikasi PROTAL. **Permasalahan keempat** dari PROTAL berhubungan dengan data isian administrasi yang perlu untuk dilengkapi dalam pengajuan. Isian tersebut dianggap banyak dan sedikit rumit oleh operator desa, sehingga cukup banyak pengajuan yang terhambat dan hanya menjadi draft. Dari segi kelompok

kerja, ditemukan permasalahan yang menjadi **permasalahan kelima** dari implementasi PROTAL, yaitu ditemui belum adanya penunjukan tim verifikasi dari masing-masing 7 indikator kriteria kumuh yang sebenarnya diperlukan untuk memverifikasi data yang sudah masuk. Permasalahan tim verifikasi timbul dikarenakan terdapat pihak lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang saling terlibat dalam PROTAL.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2015) merupakan suatu metode yang mengacu pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan dan analisis data. Sementara itu, pendekatan deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2010), bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan mendalam mengenai fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Moloeng (2017) menambahkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna di balik fenomena sosial yang terjadi dalam konteks tertentu. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkap implementasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung secara sistematis dan mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung, stakeholder terkait, serta masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi yang relevan, baik berupa arsip, media sosial, jurnal, gambar, dan sumber lainnya yang mendukung pembahasan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi pemerintah, yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung, karena lembaga ini merupakan pelaksana utama program yang diteliti. Lokasi penelitian meliputi kantor dinas tersebut yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 31, serta beberapa kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung, seperti deliniasi kawasan Jenes, segmen 2, segmen 4, dan Tamaru.

Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan PROTAL, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2015). Informan meliputi staf dinas, fasilitator lapangan, perangkat desa, dan masyarakat sasaran program. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh informasi lapangan yang aktual, wawancara membantu menggali data lebih mendalam, dan dokumentasi melengkapi data yang diperoleh dengan bahan tertulis maupun visual.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Temuan Penelitian

komunikasi antar pelaksana kebijakan dalam implementasi PROTAL belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun demikian, masing-masing aktor kebijakan telah berupaya menyampaikan informasi secara cukup jelas dan menunjukkan komitmen untuk menjaga komunikasi serta koordinasi yang diperlukan. Dalam hal sumber daya, seluruh sumber daya manusia yang terlibat telah menjalankan peran sesuai kewenangan yang dimiliki, namun masih ditemukan beberapa aktor kebijakan yang secara tidak langsung menjadi penghambat bagi pihak lainnya. Selain itu, sumber daya peralatan masih membutuhkan pengembangan, terutama dalam hal teknologi dan fasilitas operasional, dan proses realisasi pengajuan pun mengalami hambatan akibat keterbatasan anggaran. Dari sisi disposisi, ditemukan adanya ketimpangan antar aktor yang terlibat dalam PROTAL, sehingga diperlukan pembagian tugas dan peran yang lebih jelas agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan optimal. Adapun

struktur birokrasi telah diupayakan berjalan rapi dengan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan pembagian masing-masing, namun terdapat kendala administratif, khususnya dalam pengisian data yang masih mengacu pada struktur birokrasi yang terlalu tinggi dan menyulitkan proses di lapangan.

3.2 Pembahasan

Aplikasi Program Tulungagung Layak Huni atau biasa disingkat PROTAL adalah suatu aplikasi *web-based* atau aplikasi berbasis web yang digarap oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Kelompok Kerja PROTAL. Inisiasi aplikasi tersebut berlandaskan pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penanganan Kawasan Kumuh dengan Program Tulungagung Layak Huni di Kabupaten Tulungagung. Aplikasi PROTAL dikembangkan untuk mendukung penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung melalui terciptanya satu *database* wilayah kumuh serta meningkatkan kualitas wilayah kumuh sebagai salah satu bentuk pelayanan publik. Aplikasi PROTAL diluncurkan pada tanggal 22 November 2022 yang sekaligus menjadi rangkaian peringatan Hari Toilet Sedunia. Selain diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PROTAL juga dikembangkan untuk memudahkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani indikator kumuh sesuai cakupannya masing-masing. Kehadiran PROTAL menjadi salah satu hal yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan peningkatan kualitas wilayah, serta memudahkan pemerintah dalam koordinasi penanganan wilayah tersebut.

Melihat tujuan tersebut, kehadiran aplikasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) menjadi kebijakan yang menjadi upaya nyata dalam meningkatkan dan memaksimalkan layanan khususnya dalam penanganan kawasan kumuh. Hadirnya PROTAL melalui koordinasi pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tulungagung menjadi bentuk keberlanjutan dari upaya penanganan wilayah kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dengan penyempurnaan dalam beberapa kekurangan yang dievaluasi setelah pelaksanaan KOTAKU.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan dan data yang diperoleh, hasil analisis dari penelitian ini yaitu Implementasi Aplikasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam Mendukung Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tulungagung yang mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan atau program menurut Edward III dalam Widodo (2010), dimana faktor-faktor tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan hubungan timbal balik atau interaksi yang dilakukan antarpihak baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi antara pembuat kebijakan, penyelenggara kebijakan, dan masyarakat terlaksana. Dalam hal ini, aplikasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) sangat penting untuk dikomunikasikan, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam kebijakan aplikasi ini serta bagaimana aplikasi ini berperan dalam mendukung penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung.

Menurut Edward III, komunikasi mencakup tiga dimensi, yaitu dimensi transmisi (*transmission*), dimensi kejelasan (*clarity*), dan dimensi konsistensi (*consistency*). Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar dalam menganalisis hasil temuan dalam penelitian terkait implementasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) di Kabupaten Tulungagung, khususnya dalam mendukung penanganan kawasan kumuh.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pada dimensi transmisi, komunikasi pihak pelaksana kebijakan (khususnya pihak Disperkim Kabupaten Tulungagung) dengan pihak terkait seperti OPD, operator desa, dan masyarakat belum berjalan sepenuhnya efektif. Meski Disperkim mengambil alih peran sebagai *leading sector* dan menjadi penghubung informasi antar pihak terkait, proses transmisi informasi masih belum optimal, khususnya dalam koordinasi antar OPD. Hambatan tersebut karena belum adanya staf teknis yang ditunjuk secara resmi oleh OPD untuk menjadi bagian dari PROTAL dan menjadi staf tetap yang mewakili OPD masing-masing dalam Pokja PROTAL. Kondisi tersebut mengakibatkan koordinasi

Pokja PROTAL hanya bergantung pada rapat rutin, dengan belum adanya atau belum maksimalnya jalur komunikasi langsung yang cepat dan fleksibel. Apabila dilihat dari sisi komunikasi dari pelaksana kebijakan ke pemerintah desa dan masyarakat, transmisi informasi sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana upaya perbaikan dilakukan oleh pemerintah melalui monitoring dan pemberian informasi langsung kepada operator desa maupun masyarakat penerima manfaat. Dimensi transmisi sudah berjalan cukup baik apabila dilihat dari komunikasi eksternal Pokja, meskipun dari segi transmisi internal masih memerlukan peningkatan dalam efisiensi komunikasi.

Pada dimensi kejelasan, pihak pelaksana kebijakan telah berupaya menyampaikan informasi dengan jelas. Upaya penyampaian informasi tersebut dilaksanakan melalui bimbingan teknis, monitoring, maupun kontak yang dapat dihubungi. Tujuan utama dari PROTAL yaitu menciptakan satu *database* kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas wilayah sudah disosialisasikan, namun dalam praktiknya kejelasan dari informasi belum sepenuhnya dan secara merata diterima oleh pihak terkait, terutama di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi hal tersebut adalah pergantian operator desa yang mengakibatkan informasi dan bimbingan teknis di awal tidak tersampaikan kepada operator desa yang baru. Kondisi tersebut mengakibatkan kendala dalam proses penyampaian informasi teknis karena pihak pelaksana kebijakan harus menyampaikan ulang informasi dan bimbingan teknis terkait PROTAL. Meski demikian, operator desa dan masyarakat penerima manfaat menyatakan bahwa informasi yang disampaikan sudah cukup mudah dimengerti, terutama saat dijelaskan langsung oleh tim monitoring PROTAL dari Disperkim Kabupaten Tulungagung, yang beranggotakan staf bidang PKP, staf bidang CK, dan TFL. Dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa kejelasan informasi masih bergantung pada intensitas komunikasi antar pihak terkait dalam kebijakan implementasi PROTAL.

Hasil penelitian dalam dimensi terakhir, yaitu dimensi konsistensi menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan telah menunjukkan komitmen untuk mengupayakan dan menjaga komunikasi agar dapat berkelanjutan, terutama melalui kegiatan monitoring ke masing-masing desa. Upaya tersebut nyatanya belum cukup optimal karena jadwal monitoring yang tidak terlalu sering serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan monitoring. Pergantian operator desa juga menjadi salah satu faktor yang menghambat konsistensi dalam penyampaian informasi, karena dengan pergantian tersebut, tidak ada mekanisme terkait pelimpahan informasi saat operator berganti. Faktor-faktor tersebut menjadi penghambat konsistensi informasi dalam implementasi PROTAL.

Dilihat secara keseluruhan, indikator komunikasi dalam implementasi PROTAL masih menghadapi beberapa tantangan dari masing-masing dimensi. Meski sudah dilakukan beberapa upaya untuk memenuhi efektivitas komunikasi melalui penyediaan kontak langsung, diskusi melalui rapat, dan monitoring lapangan, dalam kenyataannya masih diperlukan peningkatan pada aspek komunikasi antar OPD, kejelasan teknis di tingkat desa, serta konsistensi dalam komunikasi jangka panjang antar pihak. Indikator komunikasi penting untuk diperhatikan karena tidak hanya berperan dalam kelancaran koordinasi internal antar Pokja PROTAL khususnya internal antar OPD, namun juga berpengaruh pada sejauh mana masyarakat sebagai penerima manfaat dapat memahami dan memanfaatkan PROTAL sesuai dengan tujuan awal dari ditetapkannya kebijakan tersebut.

3.2.2 Sumber Daya

Dalam kelancaran implementasi kebijakan atau program, sumber daya menjadi salah satu bagian penting yang berperan untuk memberi bantuan pada kebutuhan-kebutuhan implementasi kebijakan atau program. Tanpa sumber daya yang cukup dan mumpuni, suatu kebijakan atau program akan beresiko mengalami hambatan karena adanya kekurangan di sumber daya. Edward III dalam Widodo (2010) memaparkan bahwa terdapat empat jenis sumber daya yang masing-masing memegang peran penting dalam melancarkan kebijakan atau program, yaitu sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya anggaran, dan sumber daya kewenangan. Keempat komponen tersebut merupakan fondasi dalam mendukung agar implementasi suatu kebijakan berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil temuan penelitian, implementasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) menunjukkan dinamika yang beragam dalam tiap dimensi sumber daya.

Sebagai komponen kunci dalam implementasi PROTAL, dimensi sumber daya manusia memberikan pengaruh yang cukup besar, mengingat aplikasi PROTAL yang bersifat digital serta adanya keterlibatan kerja lintas sektor di tingkat kabupaten maupun desa. Hasil penemuan di lapangan, pihak Disperkim Kabupaten Tulungagung (khususnya bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) dapat dianggap sebagai pelaksana utama dan roda penggerak dari PROTAL. Dengan peran tersebut, bidang PKP Disperkim Kabupaten Tulungagung bersama bidang Cipta Karya (CK) Disperkim Kabupaten Tulungagung, dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Disperkim Kabupaten Tulungagung telah menjalankan peran aktif dalam memberikan bimbingan teknis, melakukan monitoring, serta melakukan proses pengolahan data ajuan yang masuk dari pihak desa. Kendala dari dimensi sumber daya manusia ditemukan pada dua titik yang cukup krusial dalam implementasi PROTAL, yaitu di tingkat operator desa dan staf teknis dari OPD terkait. Operator desa dengan beban kerja yang lain tentu tidak bisa diharapkan sepenuhnya memiliki dedikasi khusus untuk mengelola PROTAL di wilayah masing-masing, hal itu berdampak pada ketergantungan terhadap monitoring dari tim PROTAL. Dari sisi OPD, kendala muncul karena belum adanya penunjukan staf teknis tetap dari tiap OPD yang memberikan dampak hambatan dalam koordinasi antar OPD yang terkait. Peran sumber daya manusia yang terlibat mewakili BAPPEDA juga dianggap sedikit kurang mendukung PROTAL sesuai sasaran. Secara umum, dapat dikatakan bahwa dimensi sumber daya manusia dalam implementasi PROTAL masih perlu dikuatkan khususnya pada keterikatan individu khusus dalam PROTAL.

Sumber daya dimensi peralatan dalam implementasi kebijakan PROTAL mengacu pada sarana prasarana teknis yang mendukung pelaksanaan PROTAL, seperti sistem dari aplikasi tersebut, server, serta infrastruktur penunjang yang lain. Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagai salah satu bagian dari sumber daya peralatan, sistem aplikasi PROTAL masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, baik dari sisi kemudahan penginputan data bagi operator desa, maupun dari sisi manajemen pengolahan data oleh pelaksana teknis. Permasalahan sumber daya peralatan yang berhubungan dengan infrastruktur ini menjadi hambatan teknis yang signifikan, khususnya apabila keterbatasan fasilitas penunjang juga terjadi pada monitoring lapangan. Dengan hal itu, sumber daya peralatan secara umum belum cukup optimal dan masih memerlukan dukungan tambahan dari aspek pengembangan teknologi maupun fasilitas operasional.

Dimensi ketiga dari sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya anggaran. Dalam hal ini, sumber daya anggaran masih menjadi salah satu titik lemah dalam implementasi PROTAL. Realisasi ajuan PROTAL masih sepenuhnya bergantung pada APBD Kabupaten Tulungagung, tanpa adanya dukungan tetap dari provinsi maupun pusat. Kondisi tersebut berdampak juga pada keterbatasan dalam pemberian honor atau tunjangan bagi operator desa, pengembangan internal dari aplikasi PROTAL, serta realisasi fisik dari ajuan perbaikan kawasan kumuh yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan desa. Permasalahan tersebut bertambah ketika adanya efisiensi anggaran yang ditetapkan, sehingga beberapa pengajuan harus tertunda. Dengan tertundanya pengajuan, berdampak pada hambatan dalam pencapaian *output* program secara maksimal. Keterbatasan anggaran nampak hanya memberikan pengaruh pada aspek teknis dan operasional, tetapi pada kenyataannya berdampak secara tidak langsung pada motivasi pelaksana di lapangan, khususnya di tingkat desa.

Dilihat dari segi sumber daya kewenangan, hasil penemuan menunjukkan bahwa kewenangan dalam PROTAL pada dasarnya sudah terdistribusi kepada masing-masing aktor kebijakan sesuai cakupannya. Meski demikian, sumber daya kewenangan masih belum dijalankan secara optimal karena terdapat beberapa hambatan dalam dimensi ini. Beberapa OPD yang bertanggung jawab dalam tiap indikator kumuh cenderung masih berfokus pada tugas pokok masing-masing dalam operasional di luar PROTAL sehingga masih kurang memberikan dukungan secara aktif dalam pelaksanaan PROTAL meskipun sudah tergabung dalam Pokja PROTAL. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang sudah diberikan kepada aktor dalam Pokja PROTAL belum sepenuhnya terlaksana untuk mendukung implementasi program. Di tingkat desa, kewenangan untuk melakukan input data serta melakukan verifikasi tahap awal terhadap pengajuan sudah dilaksanakan. Dari sisi masyarakat, dengan kewenangan yang terbatas, masyarakat dapat mengetahui dan menanyakan perkembangan pengajuan yang melibatkan data pribadi mereka, namun kewenangan tersebut tanpa keterlibatan lebih lanjut dalam proses implementasi. Dimensi sumber daya kewenangan secara umum menunjukkan bahwa dalam PROTAL sudah ditetapkan

struktur otoritas, namun belum dapat dijalankan secara sinergis. Kebutuhan peningkatan optimalisasi kewenangan masing-masing pihak ada pada koordinasi dan pembagian peran yang lebih terarah.

3.2.3 Disposisi

Indikator disposisi melihat bagaimana keinginan atau keseriusan pihak penyelenggara atau pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan atau program seturut dengan tujuan yang hendak diperoleh. Keseriusan berperan penting dalam proses penyelenggaraan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga indikator disposisi ini berpengaruh dalam bagaimana suatu program diimplementasikan. Dalam implementasi PROTAL, hasil penemuan menunjukkan adanya indikator dinamika yang beragam dalam indikator disposisi, khususnya di antara aktor kebijakan yang tergabung dalam Pokja PROTAL.

Pada tingkat teknis, bidang PKP selaku salah satu aktor kebijakan telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap program. Hal ini ditunjukkan melalui upaya dalam hal-hal yang dilaksanakan oleh bidang PKP mulai dari koordinasi monitoring, rapat, serta melakukan penyaringan dan memprioritaskan usulan yang diajukan berdasarkan urgensi di lapangan. Meskipun secara formal dan struktural kewenangan eksekusi *output* bukan berada di bidang PKP, namun upaya yang dilakukan bidang PKP untuk mengawal usulan agar terealisasi oleh OPD terkait mencerminkan tanggung jawab dan komitmen kesungguhan bidang PKP sebagai pelaksana teknis. Dukungan disposisional juga diberikan oleh bidang Cipta Karya (CK) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Disperkim Kabupaten Tulungagung yang terlibat dalam monitoring dan rutin turun ke lapangan. Dinilai bahwa masih perlu adanya peningkatan tanggung jawab dan komitmen dari BAPPEDA dalam perencanaan, karena PROTAL juga berfokus pada perencanaan, tidak hanya teknis. Terdapat sedikit *miss* peran dari BAPPEDA yang seharusnya menjadi *leading sector* terkait perencanaan, dengan bidang PKP yang bisa menjadi *leading sector* namun lebih kepada teknis bukan keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksana operasional berkomitmen dan bertanggung jawab sesuai cakupannya.

Meski sudah cukup baik komitmen dan tanggung jawab dari beberapa aktor terkait, implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh disposisi dari beberapa pelaksana saja. Hasil penemuan menunjukkan bahwa permasalahan dari indikator ini justru terletak pada lemahnya disposisi pihak aktor kebijakan di tingkat struktural. Aktor yang terlibat dalam Pokja PROTAL khususnya Sekretariat Daerah (Sekda) yang seharusnya berperan sebagai *leading sector* dinilai belum menunjukkan komitmen secara penuh dan optimal dalam menjalankan koordinasi lintas sektor. Proses eksekusi program juga menjadi kurang optimal karena adanya hambatan dari disposisi OPD terkait yang seharusnya merealisasikan pengajuan. Hal tersebut dikaitkan dengan persepsi bahwa bidang PKP menjadi penanggung jawab utama PROTAL akibat adanya keterkaitan secara historis dengan program KOTAKU yang sebelumnya menjadi tanggung jawab bidang PKP.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan disposisi antar aktor terkait dalam implementasi kebijakan PROTAL. Meskipun beberapa pihak telah menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam menjalankan tugas, tetapi apabila dukungan, komitmen, dan kepemimpinan dari aktor kebijakan di tingkat struktural masih kurang maka akan menjadi hambatan dalam implementasi PROTAL. Indikator disposisi dalam implementasi PROTAL menunjukkan hasil yang cukup baik namun masih memerlukan penguatan pada level struktural, terutama terkait koordinasi dan dukungan dari OPD serta pemangku kepentingan utama dalam kebijakan ini. Dalam upaya implementasi kebijakan yang konsisten dan menyeluruh, diperlukan keseimbangan disposisi antar aktor.

3.2.4 Struktur Birokrasi

Dalam teori implementasi kebijakan Edward III, struktur birokrasi merupakan indikator dengan peran yang mencakup pembagian tugas, kewenangan, serta pola hubungan antar aktor terkait dalam suatu organisasi. Struktur birokrasi yang tertata dan terbagi dengan jelas diperlukan dalam implementasi suatu kebijakan supaya koordinasi berjalan efektif dan tanggung jawab tiap pihak tepat sasaran.

Implementasi PROTAL telah memiliki alur birokrasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan. Dalam kebijakan, alur pengajuan, seleksi, hingga koordinasi antar OPD terkait telah ditentukan dalam kebijakan dan dalam implementasinya sudah cukup sesuai alur. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana bidang

PKP Disperkim Kabupaten Tulungagung melakukan koordinasi dengan Pokja PKP terkait proses pengajuan dari desa yang akan dilimpahkan ke OPD terkait sesuai dengan cakupan penanganan indikator kumuh. Pembahasan tersebut juga dilanjutkan dengan evaluasi dalam rapat untuk melihat perkembangan dari implementasi PROTAL.

Melalui pembagian struktur birokrasi yang dijalankan dalam PROTAL, tiap aktor kebijakan dan pihak terkait mendapat kepastian dan memahami batasan tugas maupun wewenang masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kerja sudah diupayakan untuk berjalan dengan rapi dan tidak tumpang tindih. Namun, dalam implementasi PROTAL masih ditemui kendala birokrasi khususnya pada aspek administrasi. Prosedur yang selama ini dilaksanakan untuk mengumpulkan data pengajuan dinilai masih terlalu rumit dan memberi tuntutan lebih kepada operator desa dalam mengisi data yang sebagian tidak cukup relevan pada tahap verifikasi awal. Permasalahan ini dihadapi karena acuan data isian pengajuan bersumber dari peraturan pusat, sehingga menyebabkan struktur birokrasi seperti terlalu jauh untuk kebutuhan lokal. Meskipun struktur birokrasi PROTAL sudah terbentuk, efektivitasnya dapat dikatakan belum cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di tingkat bawah.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan struktur birokrasi juga muncul dari bagaimana OPD masih kurang kesadaran untuk mendukung efektivitas PROTAL dan pemanfaatan aplikasi PROTAL karena prioritas usulan dengan yang masuk dari luar PROTAL. Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi masih belum secara penuh mendukung keberlanjutan implementasi program karena terjadi ketimpangan antara desain struktural dengan pelaksanaan di lapangan.

Dampak dari struktur birokrasi yang belum sepenuhnya optimal tidak secara langsung dirasakan oleh penerima manfaat kebijakan karena masih terdapat pihak terkait yang membantu sebagian pemenuhan kebutuhan informasi dari penerima manfaat. Sistem pelaksanaan di lapangan tetap menjangkau tujuan dan sasaran program dengan cukup baik meskipun struktur birokrasi secara sistematis belum berjalan optimal.

3.3 Rekomendasi

Aplikasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) adalah aplikasi berbasis web yang digarap oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung guna memberikan satu data satu perencanaan dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung. PROTAL menjadi layanan sarana pengajuan penanganan dari 7 indikator kumuh, yaitu kondisi bangunan gedung/rumah, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, serta kondisi proteksi kebakaran.

Hasil temuan serta hasil analisis diperoleh melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menyesuaikan pada faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan menurut George C. Edward III dalam Widodo (2010) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penemuan tersebut, dapat ditemukan secara garis besar beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam implementasi aplikasi PROTAL sehingga layanan yang disediakan belum sepenuhnya mencapai target kebijakan.

A. Pembuatan Forum untuk Membahas Permasalahan, Strategi, serta Melakukan Evaluasi Program

Kekurangan pertama adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait. Banyaknya pihak yang terkait dalam implementasi PROTAL menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan ini. PROTAL tidak hanya melibatkan tim efektif internal dari Disperkim Kabupaten Tulungagung, tetapi juga melibatkan tim efektif eksternal (yang terdiri dari anggota POKJA PKP), pemerintah desa, serta penerima manfaat sehingga diperlukan alur komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien bagi semua pihak terkait. Rekomendasi yang dapat diberikan bagi kekurangan pertama ini adalah penguatan komunikasi dan koordinasi antar pihak yang lebih rutin dan integratif. Perlu adanya forum yang melibatkan semua pihak terkait sehingga akan menjadi wadah untuk membahas permasalahan yang dihadapi, melakukan evaluasi terhadap perkembangan evaluasi program, serta mempersiapkan strategi yang menjadi bentuk tindak lanjut dalam menangani permasalahan.

B. Pengadaan Pelatihan dan Penetapan atau Peningkatan Tenaga Pendukung

Faktor penyebab yang menjadi kekurangan kedua dalam implementasi PROTAL adalah kurangnya kapasitas dan ketersediaan sumber daya pelaksana. Melihat teknis implementasi PROTAL, tiap dimensi sumber daya berperan sangat penting. Dalam PROTAL, masing-masing dimensi sumber daya tersebut masih menemui permasalahan, sehingga kapasitas dan ketersediaan sumber daya pelaksana belum efektif untuk mendukung implementasi aplikasi PROTAL. Pengadaan pelatihan teknis berkelanjutan menjadi salah satu rekomendasi dalam permasalahan sumber daya pelaksana ini. Diperlukan pelatihan yang mencakup penggunaan aplikasi PROTAL, pengelolaan data administrasi, dan bahkan kriteria kawasan kumuh. Selain pengadaan pelatihan, diperlukan juga adanya penetapan maupun peningkatan jumlah tenaga pendukung khususnya dari masing-masing OPD maupun operator desa.

C. Penguatan Disposisi

Selanjutnya, hal yang menjadi kekurangan dalam implementasi PROTAL adalah kurang optimalnya komitmen pelaksana dalam mendukung program. Guna memperlancar implementasi kebijakan, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh aktor kebijakan, tidak hanya beberapa aktor saja. Dalam implementasi PROTAL ditemukan bahwa belum semua pihak yang terlibat memiliki rasa urgensi dan komitmen yang sama terhadap implementasi PROTAL. Kendala tersebut terlihat dari terhambatnya proses realisasi pengajuan karena OPD lebih berfokus pada pelayanan dan penanganan di dinas masing-masing. Hal yang bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk menangani kekurangan ini adalah penguatan disposisi di tiap OPD terkait melalui adanya kebijakan internal yang menegaskan keterlibatan dalam implementasi PROTAL serta penetapan staf atau bidang yang menangani ajuan dari PROTAL. Pemaparan lebih lanjut terkait manfaat PROTAL dalam mendukung penanganan kumuh serta mendukung kinerja tiap OPD juga dapat disampaikan dalam forum sehingga akan meningkatkan rasa tanggung jawab serta komitmen untuk keberhasilan implementasi program.

D. Penyederhanaan Prosedur atau Data Administrasi

Kekurangan keempat dalam implementasi PROTAL adalah prosedur administrasi yang cukup rumit karena struktur birokrasi yang cukup kompleks. Data administrasi cukup sulit apabila hanya untuk verifikasi tahap awal akan menjadi hambatan bagi pemerintah desa dalam melakukan pengajuan. Penyederhanaan prosedur melalui menentukan prioritas data menjadi salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menyederhanakan data administrasi pada tahap verifikasi. Dengan disederhanakannya data tersebut, proses input data akan menjadi lebih cepat dan beban kerja operator desa dapat sedikit berkurang. Secara tidak langsung, penyederhanaan ini juga akan meningkatkan pengajuan dan pengumpulan data wilayah kumuh di Kabupaten Tulungagung.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasar pada hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengenai Implementasi Aplikasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam Mendukung Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tulungagung, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu pelayanan publik merupakan proses kegiatan yang dijalankan oleh pihak pemerintah sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan atau keinginan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu bentuk dari pelayanan publik adalah melalui implementasi suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah setelah mengkaji permasalahan publik. Implementasi kebijakan sendiri merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan sesuai dengan rumusan kebijakan yang ditetapkan. Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) merupakan aplikasi berbasis *website* yang digagas oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu bentuk implementasi kebijakan. Hadirnya PROTAL bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik khususnya dalam meningkatkan kualitas wilayah melalui penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung.

Layanan yang disediakan oleh PROTAL merupakan layanan pengajuan penanganan permasalahan dari 7 indikator kumuh dari desa atau masyarakat. Adanya PROTAL menjadi langkah untuk membantu masyarakat dan desa mendapatkan peningkatan kualitas wilayah melalui usulan pengajuan karena PROTAL dirancang untuk mewujudkan satu *database* untuk penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung.

Selain kesimpulan umum yang disampaikan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini. Kesimpulan tersebut ditarik dengan mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan atau program menurut George C. Edward III dalam Widodo (2010), yaitu:

1. Dari segi komunikasi, pihak yang terlibat dalam PROTAL sudah cukup mengupayakan agar komunikasi dan koordinasi terjalin dalam implementasi PROTAL. Berbagai upaya seperti bimbingan teknis, rapat, monitoring, dan kontak langsung telah dilaksanakan. Namun, karena belum adanya penetapan staf teknis tetap dari tiap OPD, komunikasi antar tim efektif eksternal belum cukup optimal dalam implementasi PROTAL. Komunikasi di tingkat desa dinilai cukup baik meski menghadapi kendala apabila terjadi pergantian operator desa yang menghambat keberlanjutan penyampaian informasi maupun teknis program.
2. Terdapat beberapa dimensi dalam indikator sumber daya, yaitu sumber daya manusia, peralatan, anggaran, dan kewenangan. Keempat dimensi sumber daya tersebut belum sepenuhnya memadai dan mendukung dalam implementasi PROTAL. Indikator sumber daya mengalami kendala pada keterbatasan kapasitas operator desa, perlunya pengembangan dalam sistem PROTAL, ketergantungan realisasi dan implementasi pada APBD, serta kurang optimalnya pembagian kewenangan khususnya pada OPD terkait.
3. Dari indikator disposisi, sudah terdapat komitmen dan rasa tanggung jawab khususnya dari pelaksana teknis program, yaitu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Disperkim Kabupaten Tulungagung, Bidang Cipta Karya (CK) Disperkim Kabupaten Tulungagung, serta Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Namun, aspek disposisi menghadapi tantangan dari segi komitmen di tingkat struktural, khususnya dari OPD lain yang tergabung dalam POKJA maupun Tim Efektif Eksternal PROTAL. Rasa tanggung jawab dan komitmen dari pihak-pihak terkait masih perlu ditingkatkan agar koordinasi dan realisasi ajuan dapat tercapai.
4. Dalam implementasi PROTAL, indikator struktur birokrasi telah ditetapkan dengan cukup jelas, baik dari segi pembagian tugas maupun sistematisasi koordinasi pihak terkait. Meski demikian, masih ditemui hambatan administratif karena struktur birokrasi yang cukup kompleks dan kurangnya penyelarasan antara kebutuhan verifikasi tahap awal tingkat daerah dengan acuan dari pemerintah pusat. Selain itu, integrasi antar OPD terkait juga masih belum cukup efektif sehingga kurang mendukung implementasi PROTAL.

Apabila dilihat secara umum, implementasi PROTAL telah menjadi suatu gerakan positif dalam upaya mendukung penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung. Namun, dalam implementasinya masih diperlukan beberapa perbaikan dan pembaharuan pada tiap aspek, seperti optimalisasi aspek komunikasi, penguatan sumber daya, peningkatan komitmen pihak atau aktor kebijakan terkait, serta penyederhanaan struktur birokrasi.

Saran

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan peneliti terkait Implementasi Aplikasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam Mendukung Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tulungagung, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya optimalisasi komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait, khususnya antar OPD. Guna mendukung optimalisasi komunikasi, penunjukan staf teknis tetap untuk PROTAL dari tiap OPD menjadi suatu hal yang penting. Hal tersebut akan mendukung penguatan koordinasi lintas sektor dan mempercepat alur penyampaian informasi sehingga komunikasi akan lebih efektif.

2. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi PROTAL. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengadakan pelatihan secara berkala bagi operator desa serta menyelenggarakan forum atau rapat berkala dengan OPD terkait.
3. Perlu melakukan pengembangan sistem aplikasi sehingga lebih *user-friendly* atau lebih mudah digunakan. Salah satu upaya pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan menyederhanakan proses pengajuan serta peningkatan tampilan aplikasi sehingga memudahkan pengguna, baik pengguna pihak desa yang melakukan pengajuan maupun pengguna di level teknis yaitu dinas terkait.
4. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Tulungagung atau tim efektif eksternal PROTAL dapat mengupayakan alternatif sumber pendanaan disamping APBD. Perlu adanya kerja sama dengan pihak swasta yang mampu menunjang keberlanjutan implementasi PROTAL atau dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang dapat memberikan dukungan.
5. Perlu mengadakan evaluasi terhadap kelengkapan data administrasi khususnya pada verifikasi tahap awal. Diharapkan data isian dapat relevan dengan kebutuhan lapangan sesuai dengan tahapan, sehingga tidak ada pihak yang terbebani baik dalam melakukan pengajuan maupun memilah prioritas usulan pengajuan.
6. Sehubungan dengan disposisi struktural, perlu adanya komitmen yang lebih khususnya dari pimpinan (tim pengarah) dan tim pelaksana dari OPD terkait. Diharapkan aktor kebijakan dapat menjadikan penanganan kawasan kumuh melalui PROTAL sebagai program lintas sektor prioritas, sehingga implementasi dapat berjalan sinergis optimal.

Melalui implementasi saran-saran tersebut, diharapkan implementasi dari aplikasi PROTAL dapat berjalan lebih optimal. Meningkatnya implementasi dari PROTAL diharapkan dapat mendukung Pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya OPD terkait dalam menangani kawasan kumuh dan mewujudkan peningkatan kualitas wilayah.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ayuningtyas, R. (2014). Analisis kebijakan kesehatan: Prinsip dan aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Disperkim Tulungagung (2024). PROTAL Program Tulungagung Layak Huni. [DINAS PERKIM \(tulungagung.go.id\)](https://dinas.perkim.tulungagung.go.id).
- Katharina, Riris. 2020. Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Keman, S. 2005. Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 2(1), 29-42.
- Khadafi, M. 2023. Implementasi Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dalam Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Terkait Pinjaman Online Legal di Lingkungan Mahasiswa Udayana. *Skripsi*. Bali: Universitas Udayana.
- Mahnunah, N., Adninda, G. B., Kartikakirana, R. A., Neritarani, R., & Ramadhan, B. (2022, January). Policy Implementation of Slum Upgrading Program in Coastal Area,(Case Study: Slum Upgrading in Kelurahan Tanjungmas, Semarang). In *Conference Series* (Vol. 4, pp. 133-141).
- Moloeng. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchiri, L., & Mungai, A. W. (2024). INTERFACE EVALUATION APPROACHES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SLUM UPGRADING PROGRAMME IN NAIROBI CITY COUNTY,

- KENYA. *International Journal of Social Sciences Management and Entrepreneurship (IJSSME)*, 8(1).
 Solymári, D., Mangera, J., Cziráj, R., & Tarrósy, I. (2021). Overview of Kenyan Government Initiatives in Slum Upgrading: The Case of KENSUP and KISIP Projects. *Hungarian J. Afr. Stud.*, 15, 37.
- Nanawi, H. 2019. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press.
- Panday, P. K., & Panday, P. K. (2020). Formation of slums and slums upgrading initiatives in Bangladesh. *The Face of Urbanization and Urban Poverty in Bangladesh: Explaining the Slum Development Initiatives in the light of Global Experiences*, 57-85.
- Pasolong, H. (2008). Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Kabupaten Tulungagung (2023). Data Statistik Umum Kabupaten Tulungagung 2023. [Satu Data Indonesia \(tulungagung.go.id\)](https://satu.data.indonesia.go.id).
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penanganan Kawasan Kumuh dengan Program Tulungagung Layak Huni di Kabupaten Tulungagung.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Purnomo, D., & Pahude, M. S. 2021. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Baru RW 007 RT 006 Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Inovasi Penelitian* 2(7), 2184-2185.
- Santosa, E. 2012. Faktor penyebab kawasan kumuh dan strategi penanganannya di perkotaan. *Jurnal Perkotaan*, 4(2), 121-122.
- Satori, D., & Komariah, A. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sekretariat Nasional SDGs. SDGs Indonesia. (<https://sdgs.bappenas.go.id>)
- Subarsono, A. G. (2011). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyanto. 2014. Panduan Praktis Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Titisari, D., Yunita, E., & Kurniawan, F. (1999). *Kajian Permukiman Desa Pinggiran Kota: Mengukur Tingkat Kekumuhan Kampung*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Triastuti, N., Pramono, J., & Haryanto, A. T. (2023). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) TAHUN 2021 DI DESA KLITIK KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN. *Jl@ P*, 12(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.
- Widodo, A., & UB, A. R. (2023). Efektivitas Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kabupaten Sidoarjo. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS)*, 2(2), 18-18.
- Widodo, J. (2010). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan publik. Malang: Bayumedia.
- Yulia, F., Istijono, B., & Hidayat, B. (2024). Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Menangani Permukiman Kumuh Di Kota Padang. *Jurnal Niara*, 16(3), 642-651.